

RINGKASAN

Salah satu permasalahan yang paling menonjol di era pelaksanaan otonomi daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 ialah pertanggungjawaban Kepala Daerah dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 yang merupakan implementasi dari UU tersebut telah ditetapkan proses dan tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan serta laporan pertanggungjawaban karena hal-hal tertentu.

Polemik yang terjadi antara Kepala Daerah dan DPRD karena adanya beda penafsiran terhadap Peraturan Pemerintah tersebut terutama pada pasal yang mengatur tentang pemberhentian Kepala Daerah yang apabila pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD.

Problematikanya ada pada parameter, tolok ukur penilaian pertanggungjawaban yang hanya didasarkan pada Rencana Strategi (Renstra) serta posisi DPRD yang dirasakan lebih kuat dari Kepala Daerah.

Pemberhentian Walikota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro oleh DPRD adalah pemberhentian Kepala Daerah ditengah jalan dalam masa jabatannya dan merupakan kasus pertama sejak dimulainya pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 108 Tahun 2000.